



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputy Bidang Persidangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

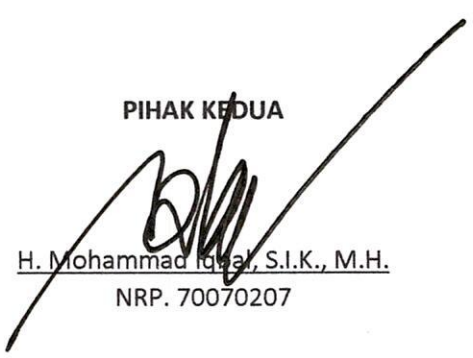
Nama : H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPD RI
selaku Sekretaris Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA


H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.
NRP. 70070207

PIHAK PERTAMA


Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU (P ₁₁₁)	6
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU (P ₁₁₂)	1
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P ₁₂₁)	-
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR (P ₁₂₂)	0,2
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S ₁₃₁)	0,1
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN (S ₁₃₂)	-
4	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P ₁₄₁)	-
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU Pajak, Pendidikan dan Agama (P ₁₄₂)	-
5	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU	Nilai kualitas dukungan bahan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₁₁)	-
		Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA (P ₂₁₂)	3,4

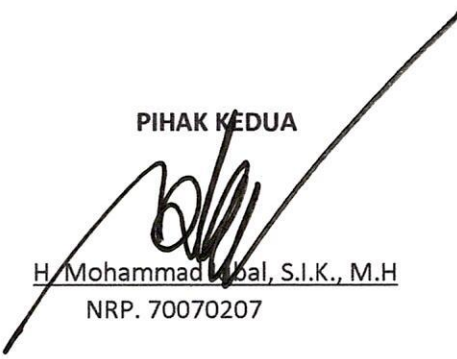
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA	Nilai kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA (P ₂₂₁)	-
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA (P ₂₂₂)	0,1
7	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMADA	Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMADA (P ₂₃₁)	0,2
		Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMADA (P ₂₃₂)	0,2

Program/Kegiatan	Anggaran
A. Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	Rp 684.300.805.000,00
1. Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD	Rp 528.644.766.000,00
2. Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Rp 155.656.039.000,00

*Catatan: Target yang masih kosong akan berlaku di tahun 2026

Jakarta, Agustus 2025

PIHAK KEDUA


H. Mohammad Akmal, S.I.K., M.H
NRP. 70070207

PIHAK PERTAMA


Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001